

338.4

WAR

S

e/



LAPORAN PENELITIAN

STUDI CURAH WAKTU PADA KELOMPOK POTENSIAL PENGEMBANG WISATA DI DATARAN TINGGI DIENG BANJARNEGARA

OLEH :

DRS. HARDI WARSONO, MTP.
IR. MGR. NUNIEK SRIYUNINGSIH, MS
IR. BAMBANG TRISETYO EDDY, MS

Dibiayai Dengan DIK Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian Tanggal 10 April 2000 Nomor : 121 / J07/ PJJ/KP/2000

**PUSLIT GENDER
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEPTEMBER, 2000**

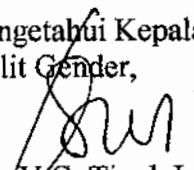
**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DIK RUTIN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

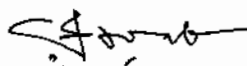
1. a. Judul Penelitian : STUDI CURAH WAKTU PADA KELOMPOK
POTENSIAL PENGEMBANG WISATA DI
DATARAN TINGGI DIENG BANJARNEGARA
- b. Kategori Penelitian : I
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs.Hardi Warsono, MTP.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Golongan/NIP : III/B -
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Fakultas / Jurusan : Fisip /Ilmu Administrasi Negara
- f. Universitas : Diponegoro
- g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Formulasi Kebijakan Pembangunan
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 orang
4. Lokasi Penelitian : Desa Dieng Kecamatan Batur Banjarnegara
5. Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.000.000,-
(Tiga juta Rupiah)

Semarang, September 2000

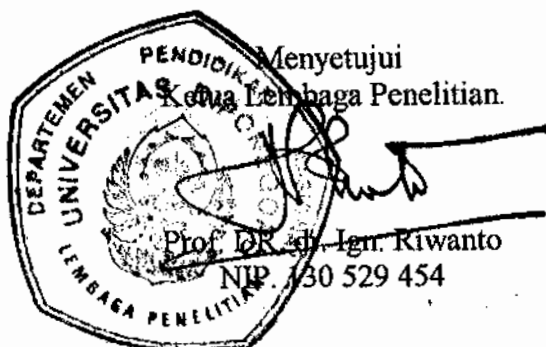
Ketua Peneliti,

Mengetahui Kepala
Puslit Gender,


Dra. V.G. Tinuk Istiarti, M.Kes.
NIP. 131 764 483



Drs. Hardi Warsono, MTP.
NIP. 131 875 462



RINGKASAN

Pemberlakuan model perencanaan yang seragam dan pembatasan wilayah perencanaan sebatas wilayah administrasi seperti diberlakukan pada model perencanaan rasional komprehensif seringkali kurang dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan lokal kawasan yang memiliki fungsi tertentu, apalagi dengan mengabaikan seting kehidupan masyarakat kawasan tersebut.

Seting kawasan masyarakat dengan memperhatikan kecenderungan pembagian peran gender sangat penting untuk perencanaan kawasan yang didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Informasi tentang pembagian peran jender yang terlihat dari alokasi waktu pada kegiatan-kegiatan pokok dan seting keterkaitan kegiatan antar lokasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan manajemen kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng memiliki beberapa kekhususan, yakni berada di bawah dua kewenangan, yakni Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Fungsi utama kawasan adalah sebagai kawasan : wisata, budidaya dan konservasi. Dengan mengkaji sistem seting (system of settings) khususnya curah waktu jender, akan didapatkan pemahaman yang lebih jelas akan komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam penguatan kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagai kawasan wisata.

Kajian dilakukan dengan penelitian naturalistik melalui metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) khususnya dengan teknik : *behavioral mapping* dan *time budget* serta diperkuat dengan metode survai.

Dari aspek keterkaitan wilayah ditemukan bahwa deliniasi kawasan berdasarkan penyebaran obyek dan batas wilayah administratif saja kurang memberikan “penguatan kawasan sebagai kawasan wisata”. Bagian penting kawasan yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam perencanaan dan manajemen kawasan wisata semestinya meliputi kawasan Kota Batur sebagai kota pelayanan wisata. Kota Batur juga dapat memberikan penguatan wisata dengan penanganan agrobisnis berorientasi pasar wisata alam Dieng.

Dari aspek seting kegiatan penduduk yang terfokus pada studi curah waktu diperoleh temuan bahwa terdapat beberapa kelompok potensial pengembang wisata yang berasal dari : kelompok usaha jasa penginapan, yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih tinggi dan kelompok marginal kawasan yang dapat diberdayakan dengan kelibatan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan pariwisata. Kelompok ini secara ekonomis termasuk kelompok yang tersisih dari kemakmuran kegiatan pertanian kentang. Beberapa kegiatan penunjang kepariwisataan dapat dimasukkan dalam agenda kegiatan kelompok perempuan.

Berdasarkan pemahaman kesatuan sistem seting kawasan wisata, ditemukan bahwa pembatasan wilayah perencanaan hanya sebatas wilayah administrasi Pemerintah kabupaten masing-masing tidak dapat memberikan penguatan yang optimal pada manajemen kawasan. Demikian pula wilayah kerjasama yang terlalu luas dengan prosentase luas yang sangat tidak berimbang hanya akan mengisakan beberapa bagian kawasan yang tidak tergarap. Oleh karenanya diperlukan pembatasan wilayah kerjasama yang berimbang atau pilihan terakhir pada pengelolaan wilayah sebatas wilayah administratif masing-masing.

PRAKATA

Studi curah waktu dan sistem seting kawasan yang dikenakan pada suatu kawasan wisata akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif atas perilaku kawasan dan juga saat-saat yang dapat digunakan sebagai intervensi pengembangan kawasan.

Segala puji bagNya atas kuasaNya, akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian ini dibiayai dari dana DIK RUTIN UNDIP tahun 2000. Kami merasa bersyukur mendapat kesempatan melakukan penelitian ini dan untuk itu kami mengucapkan terimakasih. Penelitian dengan menggunakan metode behavioral mapping ini belum banyak dilakukan di kalangan kami, dibandingkan dengan penggunaan metode survai. Oleh karenanya masih sangat banyak kekurangan yang terjadi dan kami sangat berterimakasih atas saran dan masukan untuk perbaikannya.

Semoga penelitian ini dapat menambah khasanah penelitian yang telah ada dan memberikan pengkayaan bagi kami peneliti.

Semarang, September 2000

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
IV. METODE PENELITIAN	10
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	13
A. Dasar Penetapan Deliniasi Kawasan Wisata	13
B. Sistem Seting Kegiatan Kawasan Wisata	13
1. Stakeholders Kawasan Wisata	13
2. Sistem Seting Petani Kentang	15
2.1. Peta jaringan Kerja Petani Kentang	16
2.2. Penganggaran waktu Petani Kentang	19
2.3. Profil Petani Kentang	20

3. Sistem Seting Pedagang Lokal / Calo Kentang	21
3.1. Lingkup Kegiatan	21
3.2. Peta jaringan Kerja	23
3.3. Penganggaran Waktu	25
3.4. Profil Pedagang Lokal	26
4. Sistem Seting Jasa Angkut	26
4.1. Lingkup Kerja	26
4.2. Peta Jaringan Kerja	27
4.3. Penganggaran Waktu	30
4.4. Profil Jasa Angkut	31
5. Sistem Seting Pedagang Kios Cenderamata	32
5.1. Lingkup Kerja	32
5.2. Peta Jaringan Kerja	32
5.3. Penganggaran Waktu	33
5.4. Profil Pedagang Kios Cenderamata	33
C. Sistem Seting Fisik Kawasan	34
D. Sistem Seting Ekologis Kawasan	38
E. Profil Pekerja / Petugas Badan Pengelola Harian (BPH) Dieng ...	42
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GB. V. 1. JARINGAN KERJA PETANI KENTANG DIENG	17
GB. V. 2. SETING KEGIATAN PETANI KENTANG	18
GB. V. 3. JARINGAN KERJA PERDAGANGAN KETANG	23
GB. V. 4. SISTEM SETING PEDAGANG LOKAL / CALO	25
GB. V. 5. JARINGAN KERJA JASA ANGKUT	28
GB. V. 6. SISTEM SETING JASA ANGKUT	29
GB. V. 7. SISTEMSETING PEDAGANG CINDERATA	32

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. OBYEK WISATA UTAMA DATARAN TINGGI DIENG**
- 2. ATRAKSI WISATA DIENG**
- 3. PETA KAWASAN WISATA DIENG**
- 4. FORMULIR UNTUK TIME BUDGET DAN BEHAVIOR MAPPING**
- 5. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PETUGAS BPH**
- 6. HASIL PROSESING DATA DARI SPSS**

I. PENDAHULUAN

Dampak krisis moneter yang mulai bertiup akhir tahun 1997 terasakan pada hampir semua sendi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dunia kepariwisataan. Namun demikian sumbangan kepariwisataan tetap sangat diharapkan sebagai penopang tetap berlanjutnya proses pembangunan, meski krisis sudah mulai menampakkan keredaannya. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan yang tepat pada pengembangan destinasi wisata.

Kecenderungan perencanaan kebijakan kawasan yang sentralistik pada masa-masa lalu (bahkan sampai saat ini, tahun 2000) tidak mampu menangkap aspek-aspek plural (warna lokalitas) dari wilayah-wilayah perencanaan. Produk-produk perencanaan seperti RUTRK, RDTRK atau perencanaan kawasan (site plan) untuk kawasan wisata mengikuti kaidah-kaidah yang seragam dengan pendekatan perencanaan rasional komprehensif (Rational Comprehensive Planning/RCP). RCP mensyaratkan pemahaman yang komprehensif terhadap semua aspek perencanaan dengan dukungan data yang valid. Kelemahannya tidak terdapat memahami keunikan wilayah perencanaan yang komprehensif, sehingga seringkali formulasi kebijakannya lepas dari "dunia nyata" dan diperparah dengan pemberlakuan asumsi bahwa pada kawasan wisata "seolah-olah" selalu dihuni oleh masyarakat wisata saja.

Kurangnya pemahaman terhadap kelompok-kelompok potensial pengembang wisata, seringkali melahirkan keapatisan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisatanya. Pada konsep ekoturisme, pengembangan destinasi wisata dilakukan dengan tanpa membuat kehidupan masyarakat lokal menjadi asing terhadap kegiatan dikawasannya, apalagi mengorbankan kepentingan masyarakat dan beralih dari kegiatan yang mereka anggap lebih menguntungkan kegiatan wisata. Artinya harus ada upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam ikut berkegiatan wisata pada

kelompok-kelompok yang tepat (yang termarginalisasi dari kegiatan utama kawasan yang dianggap menguntungkan tersebut).

Dataran tinggi Dieng memiliki karakteristik kegiatan utama yang khas, yakni kegiatan industri pengeboran panas bumi, pertanian sayuran terutama kentang dan kegiatan wisata. Kegiatan pertanian kentanglah yang dominan dilakukan masyarakat lokal. Kegiatan ini lebih dipilih masyarakat karena dapat memberikan keuntungan finansial yang lebih besar dari kegiatan wisata. Ajakan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan wisata jarang sekali mendapat sambutan yang memadai. Ada yang salah dalam penentuan kelompok masyarakat yang diajak berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Akibatnya pengembangan destinasi wisata kurang dapat bersinergi dengan kegiatan masyarakat (petani kentang), sehingga kehidupan wisata masyarakat semakin menurun karena ditinggalkan. Dalam perumusan kebijakan pengembangan destinasi wisata perlu diidentifikasi secara tepat siapa yang akan diberdayakan dan memiliki potensi sinergis dalam pengembangan kawasan secara umum.

Meski secara umum krisis moneter membawa kesulitan yang luar biasa pada masyarakat, tetapi dapat dijumpai beberapa profesi yang justru teruntungkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Kelompok teruntungkan ini misalnya: nelayan dengan kenaikan harga ikan yang dibarengi produksi ikan yang cukup baik di Rembang (survei 100 desa, BPS – PSW UNDIP, 1998). Petani kentang Dieng juga termasuk kelompok profesi yang teruntungkan dengan harga kentang yang melambung. Ditengah krisis, permintaan barang mewah, termasuk mobil cukup banyak dari petani kentang Dieng. Studi dampak krisis pada kelompok masyarakat desa dan profesi tertentu menemukan bahwa: diantara masyarakat yang teruntungkan oleh krisis moneter tetap terdapat kelompok marginal yang tersisih pada masyarakat penerima

“berkah” dari krisis dengan harga jual produk yang tinggi tersebut. Kelompok-kelompok marginal yang tidak dapat turut menikmati keuntungan inilah yang perlu diidentifikasi secara tajam untuk diberdayakan dengan kegiatan wisata Dieng. Ketiadaan tanah untuk bertanam kentang merupakan penyebab ketidaksertaan mereka dalam meraup “berkah” harga jual kentang yang tinggi, selain itu masalah gender.

Dari pra survai (Juli, 1997) di masyarakat dataran tinggi Dieng, terdapat cukup waktu bagi perempuan (ibu dan remaja putri) untuk beraktivitas. Serapan yang tinggi dari petani kentang pada tenaga kerja laki-laki tidak berarti tenaga perempuan terserap cukup banyak pada kegiatan pariwisata. Hal ini dikarenakan kegiatan wisata yang dapat dilakukan wanita menurut “tradisi gender penduduk lokal” belum banyak berkembang. Secara umum proses pertanian didominasi pekerja laki-laki. Lebih parahnya kegiatan pariwisata formal yang memerlukan keahlian juga dilakukan oleh laki-laki. Pemandu wisata, portir/ penarik karcis dan tukang antar ojek semuanya laki-laki. Kelibatan wanita sebagai pedagang kecil di beberapa lokasi candi, namun profesi inipun juga didominasi laki-laki. Sangat diperlukan pengetahuan tentang kelompok potensial pengembang wisata setempat. Oleh karena itu setelah diketahui kelompok masyarakat mana yang potensial menjadi pengembang kegiatan wisata juga perlu dipetakan curahan waktu keluarga dalam kegiatannya agar “rumusan kebijakan” pemberdayaan masyarakat wisata pada kawasan wisata dataran tinggi Dieng terfokuskan dengan baik.